

Penguatan *Civic Literacy* Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (*Good Citizen*) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu Di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah)

Raharjo

Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: raharjoppkn@gmail.com

Armaidly Armawi

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Email: armaidy@ugm.ac.id

Djoko Soerjo

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
Email: djoko98@yahoo.com

ABSTRACT

The study examined to the role of youth HMP PPKn Demokratia in reinforcement civic literacy to established good citizen and how the implication to the personal resilience of tutor and student in Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta.

This study used descriptive mixed methods research by using qualitative and quantitative approaches. Data collection research used deep interviews and questionnaires with Summated Likert rating scale models. The key informers and respondents determined through purposive sampling by judgment sampling criteria. Research data analysis used Miles and Huberman's interactive and inferential statistical techniques (statistics probabilities).

The results showed that the process of strengthening civic literacy was done by socialization and civic literacy competition conducted by youth HMP PPKn Demokratia at Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta. Strengthening civic literacy had implications for the personal resilience of young citizens. In youth, these implications were thought patterns and behavior patterns demonstrated by the desire and continue to strived and practiced the materials they conveyed during socialization in everyday life, and supported by high data rate percentage questionnaire implications on personal resilience of youth (tutor) with an average of 92% and for students 95%. The strengthening of civic literacy basically aimed to formed a good citizen (good citizen) in order to run the life of society, nation and the country.

Keywords: Youth Role, Civic Literacy, Good Citizen, Personal Resilience.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peran pemuda HMP PPKn Demokratia yang melakukan penguatan *civic literacy* dalam pembentukan warga negara yang baik dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi warga negara muda yang terdiri dari pemuda (tutor pengajar) dan peserta didik (murid) di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan prosedur metode campuran (*mixed methode*) yang mengkombinasikan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara mendalam dan kuesioner skala penilaian *summated ratings* model rating scale Likert. Informan kunci wawancara dan responden kuesioner ditentukan melalui purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan interaktif Miles and Huberman untuk data kualitatif dan teknik statistik inferensial (statistics probabilities) untuk data kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penguatan civic literacy dilakukan dengan cara sosialisasi dan lomba *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda HMP PPKn Demokratia di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta. Penguatan *civic literacy* berimplikasi pada ketahanan pribadi warga negara muda. Pada pemuda, implikasi tersebut berupa pola pikir dan pola perilaku yang ditunjukkan dengan adanya keinginan dan terus berusaha untuk mempraktikkan materi-materi yang mereka sampaikan saat sosialisasi pada kehidupan sehari-hari, dan didukung dengan data tingginya tingkat persentase kuesioner implikasi terhadap ketahanan pribadi pemuda (tentor) dengan rata-rata sebesar 92% dan bagi murid 95%. Adapun penguatan *civic literacy* pada dasarnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: *Peran Pemuda, Literasi Kewarganegaraan, Warga Negara yang Baik, Ketahanan Pribadi.*

PENGANTAR

Pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan dapat menjadi *agent of change* (Dewanta dan Syaifullah, 2008: 46). Persoalan-persoalan kepemudaan tenggelam dalam isu-isu besar yang mewarnai kehidupan sosial dan politik negeri ini. Riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Tahun 2011-2016, mengungkap tentang rendahnya kepercayaan publik pada institusi hukum dan politik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas (2013), tepatnya pada tanggal 28 Oktober Tahun 2013 dengan tema penelitian kepemudaan, menunjukkan bagaimana publik menilai peran pemuda saat ini belum memadai dalam sejumlah bidang. Dalam urusan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya, 73,6 persen responden memandang pemuda tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan butir-butir sila dalam Pancasila dan hanya 9,4 persen responden yang menyebutkan dengan benar mengenai isi Sumpah Pemuda. Kondisi ini tidak lepas dari kecenderungan minat dan perhatian pemuda saat ini pada hal-hal

yang bersifat praktis. Hasil survei Kompas tahun sebelumnya (2011 dan 2012) merekam luruhnya orientasi sosial kalangan muda. Publik melihat hal utama yang menjadi tantangan berat pemuda saat ini adalah narkoba (26,4 persen) dan rendahnya akhlak (15,5 persen). Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kasus narkoba menjadikan usia produktif sebagai sasaran. Catatan Polri mengungkapkan bahwa 48,7 persen pelaku narkoba pada triwulan I-2012 adalah pemuda, baik sebagai pengedar maupun pengguna. Sebagian besar berada dalam rentang usia 25-29 tahun (Wahyu, 2013: <http://nasional.kompas.com/read/jajak-pendapat-kompas-pemuda-di-simpang-jalan>).

Pengaruh arus deras budaya global yang negatif juga menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri di kalangan masyarakat dewasa ini (Andriani, 2015: <http://www.membumikanpendidikan.com/2015/03/permasalahan-bangsa-dewasa-ini-dalam.html>).

Terkait dengan permasalahan literasi secara umum, data dari penelitian yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 60 dengan skor 396 dari total 65 peserta negara untuk kategori literasi (membaca). Data terbaru terkait dengan tingkat literasi Indonesia pada tahun 2016, disampaikan oleh *Central Connecticut State University*, Amerika Serikat dengan data bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang dirilis pada 9 Maret 2016. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 60 dari total 61 negara yang diteliti (Firman, 2016: <https://tirto.id/literasi-indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS>).

Rendahnya peringkat literasi Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. *The Learning Curve Pearson*, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia pada bulan Mei 2014 merilis data mengenai peringkat mutu pendidikan dunia. Indonesia duduk di posisi terakhir dari 40 negara yang terdata dengan penilaian secara keseluruhan minus 1,84. Fenomena rendahnya tingkat literasi dan mutu pendidikan di Indonesia bertolak belakang dengan perkembangan teknologi informasi terkait dengan media sosial di Indonesia. Pada jejaring sosial dunia seperti *instagram*, *facebook*, *path* dan lain sebagainya, pengguna asal Indonesia menduduki peringkat 10 Besar pengguna terbesar situs-situs tersebut (Chandra, 2014: <http://www.kompasiana.-com-/10-peringkat-indonesia-di-dunia>).

Problematika yang terjadi pada pemuda ini tidak lain adalah salah satu kajian dari ilmu kewarganegaraan, kajian pada suatu subjek warga negara, yaitu pemuda. Meluasnya studi-studi

menyangkut kewarganegaraan tak diragukan lagi tidak hanya berkaitan dengan konteks berkembangnya demokrasi, tapi berasosiasi juga dengan kondisi-kondisi seperti post-modernisasi dan globalisasi yang termanifestasi dalam isu-isu seperti: rekonfigurasi kelas-kelas sosial, munculnya suatu pemerintahan internasional, rasionalitas baru dalam pemerintahan, dan juga merebaknya gerakan sosial baru yang memperjuangkan politik pengakuan dan redistribusi (Juru, 2013: 3).

Peningkatan *civic literacy*, yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warga bertindak secara otonom (Suryadi, 2010: 3). Menjadi sebuah tuntutan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta arus globalisasi. Ada beberapa komponen inti yang ada dalam *civic literacy*, seperti komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik. Dilihat dari perspektif integrasi politik, merupakan aspek penting dalam mengembangkan perilaku integratif yang berkontribusi secara positif terhadap integrasi bangsa (*nation building*) dan integrasi elit dengan rakyat. Keberhasilan mengembangkan perilaku integratif dalam diri warga negara dapat mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam cita-cita nasional dan tujuan bernegara (Cholisin, 2010: 1).

Kaitanya dengan *civic literacy*, secara formal konstitusional, upaya sistemik dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa merupakan imperatif yang tersurat dalam alinea keempat Pembukaan, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya secara instrumental dijabarkan dalam Pasal 2, 3, 37 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lebih tegas lagi secara operasional dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan bahwa: "... pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warganegara. Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/ andragogis (Winataputra, 2014: 1).

Perlunya penguatan *civic literacy* merupakan salah satu bentuk usaha mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa, terutama pada pemuda yang semakin berkembang. Penguatan *civic literacy* mengarahkan pola pikir pemuda untuk tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, untuk mendorong warga negara turut serta membangun bangsa melalui pemikiran dan juga aksi. Penguatan *civic literacy* mengarah pada pembentukan warga negara yang dapat memikirkan solusi permasalahan yang ada, dan meluruskan pola pikir masyarakat yang keliru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya, pola pikir yang mengarah pada ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan bangsa Indonesia sudah muncul sejak

lama. Salah satu contohnya seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh De Fretes (2013: 1) yang memnjelaskan bahwa adanya pergeseran paradigma pemahaman tentang agama dari idealitas ke historitas, dari doktrin ke entitas sosiologis dan dari diskursus esensi ke arah eksistensi menyebabkan terciptanya sentimen agama sebagai pemicu konflik Ambon Maluku tahun 1999. Terbentuknya pasukan laskar jihat dan RMS. Sebagai aliran radikal telah merusak sendi-sendi kerukunan beragama berbasis kearifan lokal "*pella-gandong*". Hal ini relevan pula dengan fenomena tergerusnya *civic literacy* di kalangan masyarakat, sehingga mudah tersulut konflik.

Di tengah perkembangan permasalahan bangsa yang terus muncul dan terjadi di masyarakat, ada komunitas masyarakat yang telah merintis dan melakukan usaha penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) PPKn Demokrata FKIPUNS pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu yang bertempat di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. HMP PPKn Demokrata itu sendiri merupakan organisasi yang *concern* dan peduli terhadap pentingnya *civic literacy* bagi generasi penerus bangsa, adapun hal-hal nyata yang telah dilakukan yaitu dengan mengadakan lomba cerdas cermat mata pelajaran PPKn tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang pertama se-Solo Raya (Surakarta, Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri) pada tahun 2012 dan dilanjutkan setiap tahun berikutnya, dengan tujuan untuk menyampaikan tentang pentingnya mata pelajaran PPKn, karena berisi tentang muatan nilai-nilai penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HMP PPKn Demokrata melakukan kerjasama dengan Dusun Binaan Mutiara Ilmu, berupa kegiatan

sosialisasi *civic literacy* dan lomba *civic literacy*. Kegiatan ini merupakan implementasi dari visi dan misi dari HMP PPKn Demokratia yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Dusun Binaan Mutiara Ilmu yang pada mulanya kegiatannya hanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), berkembang menjadi berbagai kegiatan dan berfokus pada pembentukan pribadi warga negara yang baik (*good citizen*) melalui sosialisasi dan lomba *civic literacy*.

Dusun Binaan Mutiara Ilmu dipilih menjadi lokasi penelitian karena kegiatan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu ini merupakan embrio dari gerakan pembentukan pribadi warga negara yang baik (*good citizen*) melalui proses penguatan *civic literacy*, karena di dalamnya terdapat proses pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan warga negara untuk berpartisipasi dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang digerakkan oleh pemuda. Selain itu, pertimbangan secara konseptual menurut Nuryadi (2013: 1) bahwa corak masyarakat surakarta dikenal sebagai masyarakat yang "bersumbu pendek" dan *plural* (beraneka ragam). Adanya pluralitas yang tumbuh di masyarakat menjadi salah satu isu yang relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang semakin terpengaruh dengan perkembangan informasi dan teknologi seperti munculnya sikap individualis, saling menyalahkan antar kelompok, tidak menghormati orang lain dan sebagainya. Analisis tersebut memantik ketertarikan peneliti untuk merumuskan pokok permasalahan, yaitu (1). Bagaimana proses penguatan *civic literacy* dalam pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) yang dilakukan oleh pemuda HMP PPKn Demokratia di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Kota Surakarta? (2). Bagaimana implikasi penguatan

civic literacy dalam pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) di Dusun Binaan Mutiara Ilmu terhadap ketahanan pribadi warga negara muda?

Terkait dengan konsep kepemudaan, merujuk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun (Pasal 11). Selanjutnya, amanat Undang-Undang No. 40 tahun 2009 Pasal 16 menguraikan tentang peran, tanggung jawab dan hak pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Pemuda memiliki tanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi nasional.

Pemuda pada dasarnya merupakan elemen bangsa yang menyanggah peran sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) dan agen kontrol sosial (*Agent of Social Control*) dalam masyarakat (Satrias, 2009: 92). Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 19 menjelaskan bahwa pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional, yaitu untuk (1). Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara' (2). Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3). Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, (4). Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, (5). Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, (6). Meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan/atau, (7). Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pendapat lain tentang konsep pemuda dikemukakan oleh Abdullah dan Yasin (1974: 13) yang berpandangan bahwa pemuda merupakan aktor sosial yang menghadapi dilema perspektif berlawanan. Di satu pihak, pemuda menjadi tumpuan masa depan bangsa namun sering kali

dianggap sebagai individu yang belum stabil. Masa muda dianggap usia rawan *problem*, masa transisi yang rentan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan orang dewasa (Gordon & Gordon 2003: 362, 81). Dengan demikian, peran pemuda dalam penguatan *civic literacy* merupakan aktivitas warga negara dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas generasi muda.

Civic literacy (kemelek-wacanaan kewarganegaraan) adalah pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan (Suryadi, 2010: 30). Dalam khasanah ilmu kewarganegaraan, *civic literacy* ditempatkan sebagai elemen dasar kebajikan politik warga negara (*political virtue of citizenship*), di dalam *civic literacy* tersirat penguasaan bentuk pengetahuan politik warga negara pada khususnya dan akan dimanifestasikan dalam aktivitas kewarganegaraan (Suryadi, 2010: 29-30).

Dwipayana (2013: 3) menjelaskan bahwa *civic literacy* dimaknai sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai kapasitas pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan memulai perubahan dalam komunitas dan masyarakat yang lebih besar. Kemauan dan kemampuan untuk terlibat dalam *discourse* publik. *Civic literacy* merupakan fondasi masyarakat demokratis dan manifestasi dari *Power Citizen*. *Civic literacy* dapat digunakan sebagai alat sekaligus tujuan yang diperkuat oleh pilihan kebijakan. Sebagai contoh kebijakan untuk mendorong perluasan akses membaca koran dapat secara langsung memperkuat *civic literacy*, di sisi lain kontak warga dengan berbagai lembaga politik yang disepakati secara langsung dapat

meningkatkan kualitas *civic literacy* (Suryadi, 2010: 32).

Civic literacy erat kaitannya dengan pembahasan teori *Civics*. Bahwa seperti yang dijelaskan terdahulu, *Civics* merupakan suatu ilmu yang membahas dan mengkaji tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 36). Untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan seharusnya dan sebagaimana mestinya, warga negara harus mengetahui, memahami dan mengamalkan hal-hal apa yang menjadi hak warga negara dan hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban warga negara, di sinilah letak pentingnya *civic literacy*. Pada prinsipnya, *civic literacy* merupakan penguasaan yang komprehensif tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional (Murdiono, 2014: 351).

Konsep ketahanan pribadi merupakan turunan dari konsep ketahanan nasional, yang berawal dari tingkat nasional kemudian turun ke dalam diri pribadi setiap individu. Kepribadian Pancasila harus tertanam di dalam diri setiap manusia Indonesia, sehingga mampu memiliki ketahanan pribadi yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, Soedarsono (1997: 53-54) menjelaskan ketahanan pribadi yang perlu ditumbuh-kembangkan harus dapat mencerminkan sosok manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila dengan segala implikasinya dan menunjukkan pribadi yang

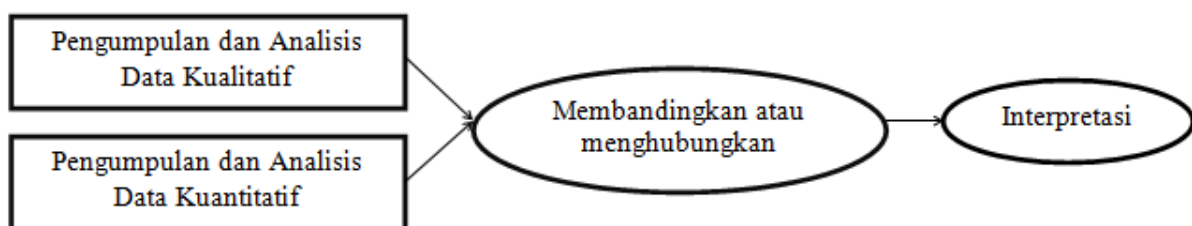
memiliki watak untuk dapat diandalkan, memegang prinsip dan seseorang yang berfokus dalam menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Ciri-ciri seorang yang memiliki ketahanan pribadi, yaitu (1). Memiliki rasa percaya diri dan berpegang pada prinsip, (2). Bebas dari rasa ketergantungan, tetapi mendambakan kebersamaan, (3). Memiliki jiwa dinamis, kreatif dan pantang menyerah.

Dimensi pribadi kewarganegaraan meliputi pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika kewarganegaraan yang bercirikan kebiasaan berpikir, hati dan tindakan yang mencerminkan tanggungjawab secara sosial. Secara individu warga negara harus mempunyai komitmen dengan cara hidup di dunia dan mengatur kehidupannya (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 170). Warga negara Indonesia yang memiliki ketahanan pribadi pada dasarnya mampu menguasai dan kompetensi pengetahuan, karakter, dan keterampilan yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia sejak penjajahan hingga Indonesia menjadi merdeka yang memiliki dasar negara dan ideologi Pancasila. Hal ini secara praktis ditunjukkan dengan menguasai *civic knowledge*, *civic disposition* dan *civic skill* yang merupakan perwujudan dari *civic literacy* yang pada muaranya adalah tercapainya tujuan mulia untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yang

akan turut serta dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk data kualitatif dan bentuk data kuantitatif, pencampuran (*mixing*) dan penggabungan (*blending*) data dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang rumusan masalah daripada dilakukan satu demi satu (Creswell, 2016: 288). Menurut Todd (dalam Putra & Hendarman, 2013: 32), metode penelitian campuran (*mixed methods*) dapat digunakan untuk mengkaji masalah yang memang sulit atau kompleks dan kurang efektif jika dilakukan dengan salah satu metode, serta membutuhkan sekaligus penjelasan teoritis dan pemanfaatan praktis. Rancangan metode penelitian campuran yang digunakan yaitu pendekatan metode campuran paralel konvergen. Dalam pendekatan ini, seorang peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisisnya secara terpisah, kemudian menghubungkan dan membandingkan hasil untuk melihat temuan-temuan yang saling mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi (Creswell, 2016: 293). Adapun rancangan metode campuran paralel konvergen ditunjukkan dalam gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1
Bagan Metode Campuran Paralel Konvergen



(Sumber: Creswell, 2016: 294)

Rancangan metode penelitian paralel konvergen ini dilakukan dengan cara pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, kemudian menganalisis data-data tersebut dengan membandingkan dan menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya sebagai dasar melakukan interpretasi data penelitian. Peneliti berpendapat bahwa metode ini sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang mengkaji tentang Penguatan *Civic Literacy* Dalam Membentuk Warga Negara Yang Baik (*Good Citizen*) dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, kuesioner, observasi, studi dokumentasi, studi literatur dan penelusuran data *online*. Instrumen kuesioner menggunakan format *rating scale* atau skala penilaian *summated ratings* (Likert) dengan skala interval 0 hingga 5. Prosedur analisis data kuantitatif menggunakan teknik statistik inferensial (*statistic probability*) selanjutnya data kuantitatif dan kualitatif disajikan dengan data kombinasi Creswell (2016, 217-219) dan Miles & Huberman (1992: 16-20).

PEMBAHASAN

Penguatan *Civic Literacy* Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (*Good Citizen*) Pemuda sebagai Aktor Penguatan *Civic Literacy*

Aktor penggerak kegiatan di Dusun Binaan (Dusbin) Mutiara Ilmu terdiri dari berbagai elemen, yaitu pengurus tetap yang merupakan masyarakat di sekitar Masjid Baitussalam Kelurahan Jebres. Adapun pemuda yang berperan merupakan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMP PPKn Demokratia. Peran yang dilakukan oleh pemuda sebagai aktor penggerak pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu yaitu dalam

hal harta/benda (ada iuran/kas), sumbangan sarana prasarana seperti buku, alat untuk membaca, papan tulis dan perkakas lainnya, sumbangan tenaga, penyaluran keterampilan dan sumbangan ide-ide atau gagasan untuk mengembangkan Dusun Binaan Mutiara Ilmu, dan yang paling dominan yaitu peran yang dilakukan dalam hal pendidikan karena pada dasarnya, basis dari kegiatan Dusun Binaan Mutiara Ilmu yaitu terkait dengan pendidikan.

Peran yang dilakukan oleh pemuda di Dusun Binaan Mutiara Ilmu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor atau dorongan ini yang kemudian menjadi motivasi pemuda untuk berperan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Adapun faktor atau dorongan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar). Faktor internal yang mempengaruhi tindakan peran yang dilakukan yaitu berasal dari keinginan sendiri dan semangat untuk menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Keinginan atau dorongan yang berasal dari diri sendiri untuk menjadi tutor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu muncul karena mahasiswa menyadari bahwa kegiatan menjadi tutor pengajar, selain akan bermanfaat untuk orang lain, juga akan bermanfaat untuk diri sendiri. Mahasiswa yang menjadi tutor merupakan mahasiswa program studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Secara langsung maupun tidak langsung, mahasiswa merasakan manfaat menjadi tutor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, seperti belajar untuk menjadi pengajar, mengelola kelas, menghadapi peserta didik (anak-anak), termasuk persiapan mental sebagai pengajar, dalam hal ini yaitu belajar berbicara di depan

umum. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan pedagogis seorang calon guru dalam proses belajar menjadi seorang guru. Faktor pendorong yang berasal dari diri sendiri juga dikarenakan adanya kepedulian sosial dalam diri mahasiswa, berupa keinginan untuk bermanfaat untuk orang lain.

Faktor eksternal yang mendorong mahasiswa turut serta atau berperan dalam kegiatan Dusun Binaan Mutiara Ilmu terdiri dari dorongan atau tuntutan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari organisasi dan faktor lingkungan sekitar. Faktor eksternal yang utama yaitu karena adanya dorongan atau tuntutan organisasi, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn Demokratia. Mereka yang tergabung dalam organisasi ini, utamanya yang ada pada Bidang Pengabdian Masyarakat, Departemen Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya, faktor lingkungan juga menjadi dorongan mahasiswa dalam rangka turut serta berperan dalam kegiatan Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini, merupakan lingkungan perkuliahan mahasiswa program studi PPKn. Kegiatan sebagai tutor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk praktik dalam hal pendidikan. Kegiatan pendidikan yang dimaksud dalam hal ini yaitu menjadi pengajar dalam kegiatan sosialisasi *civic literacy*, kemudian menjadi pengajar dalam belajar membaca Al-Qur'an (TPA), dan bimbingan belajar (bimbel). Materi-materi yang diajarkan di perkuliahan menstimulasi mahasiswa untuk melakukan praktik dari teori-teori yang diajarkan di dalam kelas, kemudian Dusun Binaan Mutiara Ilmu dijadikan sebagai wadah bagi mahasiswa dalam rangka berlatih dan melakukan praktik mengajar kepada anak-anak (peserta didik) yang ada di Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Bentuk-Bentuk Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia

Bentuk peran yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan anggota dari HMP PPKn Demokratia ini berupa peran yang secara nyata dilakukan (peran aktif). Mahasiswa turut serta menjadi aktor dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Mulai dari kegiatan inti atau rutin dari Dusun Binaan Mutiara Ilmu yaitu Taman Pendidikan AL-Qur'an (TPA), Bimbingan Belajar (Bimbel), dan Sosialisasi *Civic Literacy*, sampai dengan kegiatan-kegiatan pendukung seperti rekreasi dan mengikuti lomba-lomba TPA yang diadakan oleh lembaga lain. Berdasarkan pada angket yang diisi oleh responden tutor Dusun Binaan Mutiara Ilmu, bentuk peran yang dirasa paling dominan yang dilakukan oleh para tutor yaitu menyumbangkan tenaga dan keterampilan (membantu, mengajar, mendidik dan mensosialisasikan) segala macam materi dalam kegiatan rutin Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Hal ini ditunjukkan dengan 98% responden menjawab selalu dalam item pernyataan angket bentuk peran yang dilakukan pemuda dalam kegiatan Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Hal ini menunjukkan adanya peran aktif yang dilakukan pemuda (mahasiswa) dalam kegiatan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Kegiatan sosialisasi *civic literacy* dilakukan dengan pendekatan informal dan materi yang disampaikan bukan merupakan materi yang terkesan berat, meskipun secara tekstual materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang terkesan bukan untuk bahasa siswa sekolah dasar, namun pada pelaksanaannya, tutor pengajar akan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari (gambar 2).

Gambar 2
Suasana Sosialisasi *Civic Literacy*



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017)

Sosialisasi materi kewarganegaraan menjadi sebuah sarana penyampaian materi kewarganegaraan dengan maksud dan tujuan tertentu. Selain sebagai sarana latihan mahasiswa sebagai calon guru, sosialisasi ini memiliki muatan nilai khusus, karena baik secara langsung maupun tidak langsung, materi yang disampaikan berisi tentang nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada muaranya untuk menjadikan suatu negara menjadi negara yang lebih maju melalui mental warga negaranya, yaitu mental warga negara yang baik (*good citizen*) yang kemudian diarahkan untuk membentuk suatu masyarakat yang kolektif dan juga solid dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemuda HMP PPKn Demokratia yang menjadi tutor pengajar juga selalu menyampaikan isu-isu atau berita terkini yang sedang berkembang dibahas di media atau di masyarakat, yaitu berita-berita tentang kebijakan, tentang politik, tentang sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap keingintahuan murid terkait dengan isu tersebut dan kemudian memberikan pengertian tentang berita

tersebut, bagaimana maksud dan tujuannya, dan bagaimana sebaiknya sebagai warga negara bersikap dalam membaca informasi dari berbagai media.

Secara sederhana, proses penguatan *civic literacy* melalui sosialisasi materi kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemuda HMP PPKn Demokratia yaitu dimulai dengan tahap persiapan, kemudian implementasi dan terakhir dievaluasi. Tahap persiapan itu sendiri merupakan proses mempersiapkan segala macam kebutuhan sosialisasi *civic literacy* mulai dari materi, media, model dan metode yang akan digunakan pada saat sosialisasi, kemudian implementasi berupa tindakan sosialisasi atau penyampaian materi dan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan model, metode dan media yang telah disiapkan sebelumnya. Implementasi sosialisasi *civic literacy* dilakukan secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan terakhir dievaluasi secara lisan setelah selesai melakukan sosialisasi dengan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk dijawab dan didiskusikan oleh peserta didik atau murid Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Melalui sosialisasi *civic literacy*, terdapat proses pembentuk jiwa kritis sebagai warga negara dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan sosial maupun politik. Nilai-nilai dalam materi kewarganegaraan ditanamkan pada murid Dusun Binaan Mutiara Ilmu oleh tentor pengajar dengan adanya pembiasaan membaca. Kegiatan tersebut didukung oleh hasil penelitian Wati (2014: 61) yang menyatakan bahwa pengembangan nilai melalui kegiatan pembiasaan, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan sejak anak masih kecil, pihak sekolah menekankan sikap saling menghormati terhadap guru sebagai pengganti orang tua di sekolah merupakan salah satu upaya dari sekolah dalam rangka menanamkan sikap serta karakter anak yang berbudaya Indonesia yaitu sopan dan santun. Ada kata kunci pembiasaan dalam hal pendidikan dan pelatihan pengembangan sikap. Hal ini sesuai dengan gerakan *civic literacy* yang digagas oleh Dwipayana, yang menjelaskan bahwa ada 5 poin tentang penguatan *civic literacy*. *Pertama*, memperkuat kemampuan mengorganisir atau mengelola tindakan kolektif untuk perubahan kebijakan. *Kedua*, memperkuat kemampuan untuk membangun argumen dan berdebat dalam agenda *setting* kebijakan. *Ketiga*, memperkuat kemampuan untuk memobilisasi tindakan kolektif untuk mempengaruhi kebijakan. *Keempat*, membangun sekutu dengan cara komunikasi perseuasif untuk memperluas aksi kolektif dalam mempengaruhi kebijakan. *Kelima*, melembagakan *civic literacy* dalam keseharian warga (Dwipayana, 2013: 14). Kelima poin tersebut mengarah pada pembentukan sikap kritis warga negara dalam mengawasi kebijakan negara secara kritis dan kolektif, selain itu juga mempraktikkan muatan *civic literacy* dalam kehidupan

sehari-hari bersama dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, baik relasi antara warga negara dengan negara maupun relasi antara warga negara dengan warga negara akan terjalin dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penguatan Civic Literacy Melalui Lomba Civic Literacy

Penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda HMP PPKn Demokratia juga dilakukan melalui lomba *civic literacy*. Lomba *civic literacy* merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari adanya kegiatan sosialisasi *civic literacy*. Tendor pengajar (mahasiswa) merasa perlu melakukan evaluasi terkait dengan materi-materi yang telah disosialisasikan pada peserta didik di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Adapun lomba dilaksanakan dengan format lomba cerdas cermat, dengan dua tahapan lomba, yang pertama menjawab soal-soal pilihan ganda, kemudian tahapan yang kedua menjawab soal rebutan. Lomba *civic literacy* diselenggarakan setiap tahun, menyesuaikan situasi dan kondisi dari mulai persiapan sampai dengan kesediaan peserta didik untuk diadakan lomba *civic literacy*. Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan lomba *civic literacy* ini yaitu untuk melakukan evaluasi program sosialisasi materi kewarganegaraan yang telah dilakukan. Jika dilihat dari segi lomba yang menggunakan soal-soal pilihan ganda dan rebutan, lomba *civic literacy* ini mengarah pada evaluasi kognitif. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu satu hari, dengan pendekatan yang menyenangkan seperti halnya lomba atau kuis cerdas cermat pada siswa sekolah dasar pada umumnya. Pelaksanaan lomba *civic literacy* ini diketahui sebagai salah satu metode evaluasi yang dilakukan oleh tentor

pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Namun di sisi lain, seperti yang dijelaskan oleh Sri Rahayu, ada suatu apresiasi dan motivasi yang ingin ditimbulkan melalui kegiatan lomba *civic literacy*. Ada apresiasi berupa hadiah dari lomba yang dilakukan, yang kemudian diarahkan untuk memotivasi peserta didik untuk lebih giat dan semangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi *civic literacy* di Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Kendala Dalam Penguatan *Civic Literacy*

Kendala dalam pelaksanaan penguatan *civic literacy* terbagi menjadi dua, yaitu kendala personal yang merupakan kendala yang berasal dari dalam diri pelaku seperti motivasi yang kurang, rasa malas, tidak konsisten dengan kehadirannya menjadi tutor, tidak sungguh-sungguh dalam menyiapkan materi, dan sebagainya. Sedangkan untuk kendala teknis lebih cenderung kepada kurangnya sarana dan pra sarana yang mendukung kegiatan penguatan *civic literacy*. Kendala yang terjadi pada proses penguatan *civic literacy* dialami oleh tutor pengajar dengan naik turunnya motivasi mengajar karena muncul kejenuhan dan rasa malas. Adanya ketidaksiapan pada saat akan mengajar juga menjadi salah satu penyebab tidak hadirnya tutor pada saat seharusnya bertugas. Kendala personal ini, membuat pengurus Sekolah Dusun Binaan Mutiara Ilmu merumuskan suatu solusi, melalui kegiatan sasehan tutor, kemudian dicari tahu apa yang sebenarnya dirasakan dan diinginkan oleh para tutor pengajar (mahasiswa), kemudian dicari solusinya bersama-sama, misal pergantian jadwal, pertukaran materi, kerjasama penyusunan materi ajar dan hal-hal lain sesuai kesepakatan bersama pada saat sasehan tutor pengajar. Hal ini menjadi solusi yang tepat guna

meningkatkan kembali kinerja para tutor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Terkait dengan kendala teknis lebih cenderung kepada sarana media pembelajaran yang belum lengkap. Hal ini dikarenakan memang karena Dusun Binaan Mutiara Ilmu merupakan lembaga non profit, sehingga kelengkapan sarana dan pra sarana memang tidak begitu diperhatikan. Namun hal ini juga bisa diatasi oleh pengurus dengan meminjam media-media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran kepada lembaga-lembaga lain di sekitar Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Selain itu, proses penyampaian materi juga tidak bisa diterima langsung oleh peserta didik dan butuh berulang-ulang penyampaian. Hal ini dikarenakan secara teknis, penerimaan materi oleh peserta didik yang mayoritas merupakan siswa sekolah dasar, membutuhkan keahlian dan kesabaran yang lebih, agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Adapun hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para tutor pengajar yang merupakan calon guru untuk kemudian melakukan eksplorasi pedagogis dan belajar mengolah materi dalam rangka untuk mendapatkan suatu formula yang tepat dalam proses pembelajaran. Solusi yang dilakukan tutor pengajar yaitu dengan saling konsultasi satu sama lain dan melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap apa saja kebutuhan anak-anak dalam proses pembelajaran. Hal ini yang kemudian menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi para tutor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Tujuan dan Manfaat Penguatan *Civic Literacy*

Penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda di Dusun Binaan Mutiara Ilmu

berawal dari faktor keinginan sendiri (internal) sebagai mahasiswa PPKn dan dari faktor eksternal adanya tuntutan organisasi. Termuat dalam Visi dan Misi HMP PPKn Demokratia FKIP UNS, yang kemudian dijalankan bersama-sama oleh seluruh pengurus, salah satunya dengan melakukan penguatan *civic literacy*. Visi dari HMP PPKn Demokratia FKIP UNS, periode 2016 adalah “Menciptakan himpunan yang unggul sehingga bermanfaat di lingkungan FKIP UNS”, sedangkan Misinya adalah (1). Mewujudkan administrasi yang transparan dan bertanggungjawab, (2). Mengoptimalkan kesolidan antar pengurus, (3). Mengoptimalkan pengabdian kepada prodi maupun masyarakat, (4). Menumbuhkembangkan potensi, minat dan bakat pengurus, (5). Membantu pemerintah dalam rangka membentuk *good citizen* (Buku Pedoman Organisasi HMP PPKn Demokratia, 2016: 16)

Adapun kegiatan penguatan *civic literacy* sebagai salah satu kegiatan dalam Program Sekolah Dusun Binaan yang dirancang oleh Departemen Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan perwujudan dari misi nomor 3, 4 dan 5. Tujuan akhir dari penguatan *civic literacy* pada dasarnya ada pada misi ke 5, yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Pembentukan warga negara yang baik ini bukan hanya diarahkan pada peserta didik di Dusun Binaan Mutiara Ilmu saja, melainkan juga ditujukan pada tentor pengajar itu sendiri. Maksudnya, penguatan *civic literacy* bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang baik bagi para mahasiswa (tentor pengajar) maupun para peserta didik di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Tujuan utama penguatan *civic literacy* dijelaskan oleh Diky Setiawan selaku Ketua Umum HMP PPKn Demokratia, yaitu untuk

membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Terbentuknya warga negara yang baik diproyeksikan sebagai suatu bentuk usaha untuk menyiapkan generasi baru yang lebih baik yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penguatan *civic literacy* memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan analisis pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, berikut beberapa manfaat dari adanya kegiatan penguatan *civic literacy* bagi tentor pengajar dan bagi peserta didik. Bagi tentor pengajar manfaat yang diperoleh adalah (1). Membentuk mental sebagai seorang calon pendidik, (2). Belajar berinteraksi dengan peserta didik, (3). Mengetahui kebutuhan dalam sebuah proses pembelajaran, (4). Lebih mengenal karakter peserta didik, (5). Menciptakan disiplin diri, (6). Menyadari pentingnya menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Bagi murid/peserta didik manfaat yang diperoleh adalah (1). Murid menjadi lebih mengetahui tentang apa itu kewarganegaraan, (2). Murid mengetahui bagaimana untuk bertindak sopan santun, (3). Murid mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, (4). Murid menjadi lebih saling menghormati antar teman, (5). Murid mengetahui tentang bagaimana cara untuk menjadi warga negara yang baik.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda

Implikasi penguatan *civic literacy* dalam pembentukan warga negara yang baik terhadap ketahanan pribadi warga negara muda dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Pertama, membangun kesadaran tentang pentingnya *civic literacy*. Peran pemuda dalam

penguatan *civic literacy* dilakukan dengan sosialisasi *civic literacy* atau materi-materi kewarganegaraan. Pada prosesnya, sosialisasi materi kewarganegaraan membutuhkan suatu usaha baik bagi tentor pengajar maupun bagi peserta didik. Tendor pengajar harus menyiapkan segala hal dari mulai media, model dan isi materi untuk kemudian disampaikan kepada peserta didik (murid) Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Sedangkan para murid juga berusaha untuk menerima materi tersebut, meskipun bukan lagi ada pada jam sekolah. Penguatan *civic literacy* ini memiliki alasan kuat, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum HMP PPKn Demokratia FKIP UNS, Diky Setiawan (20) yang memaparkan tentang alasan melakukan peran penguatan *civic literacy* melalui sosialisasi materi kewarganegaraan yang kemudian berdampak pada kesadaran mengenai pentingnya *civic literacy* bagi masyarakat. Ada semacam keresahan pada kondisi bangsa dewasa ini, terutama kondisi mahasiswa yang seharusnya menjadi seorang yang punya solusi akan tetapi justru jadi sumber masalah, dan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini yang sudah berkembang pesat di tengah masyarakat dan membawa dampak bagi masyarakat. Adapun yang dikhawatirkan para pemuda ini yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Kedua, membentuk karakter privat dan karakter publik untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda (mahasiswa) memiliki tujuan utama untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Adapun pelaksanaan penguatan *civic literacy* yang dilaksanakan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu dengan peserta didiknya rentang usia sekolah dasar sejalan

dengan tujuan menyiapkan generasi penerus yang memiliki mental sikap warga negara yang baik (*good citizen*) dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kajian tentang warga negara dan kewarganegaraan selalu dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat, bahwa warga negara dikatakan sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), tentu saja memiliki kualifikasi tertentu agar dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik mampu memerintah secara baik dan ia dapat diperintah secara baik pula. Kemudian muncul pernyataan tentang warga negara, bahwa warga negara ada yang termasuk *good citizen* dan *bad citizen*. *Good citizen* juga berbeda dengan *good man*. *Good citizen* amat ditentukan dari konstitusi, yaitu warga negara yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi suatu negara (Winarno, 2009: 48).

Pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) merupakan suatu tujuan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan *civic literacy*. Pada bagian ini, peneliti ingin menegaskan dan menjelaskan terkait dengan sikap warga negara yang baik yang lebih spesifik, yang dibangun melalui peran penguatan *civic literacy* di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Adapun tabel distribusi frekuensi manfaat dan implikasi penguatan *civic literacy* dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) menunjukkan tingkat rata-rata frekuensi yang tinggi yaitu mencapai 93% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu dan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Tingkat persentase 93% termasuk dalam skala yang tinggi, dan dapat disimpulkan adanya suatu indikasi ke arah pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Data tersebut juga didukung oleh penjelasan dari tentor pengajar melalui wawancara dengan menegaskan ada indikasi

pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, melalui kegiatan yang paling utama dalam proses pembentukan *good citizen* yaitu melalui penguatan *civic literacy*.

Pembentukan warga negara yang baik yang dilakukan oleh pemuda (mahasiswa) HMP PPKn Demokratia di Dusun Binaan Mutiara Ilmu merupakan sebuah usaha dalam bentuk peran nyata mengarahkan suatu pemahaman, pola perilaku dan sikap peserta didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu menuju mental seorang warga negara yang baik (*good citizen*). Menariknya, mereka tutor pengajar juga mengakui bahwa yang mereka lakukan juga sedang belajar menjadi warga negara yang baik, namun dengan adanya tindakan yang nyata, tindakan yang bermanfaat untuk orang lain dalam bentuk kegiatan-kegiatan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Pada dasarnya, arah pola pembentukan warga negara yang baik yang mereka lakukan yaitu dengan pendekatan *citizenship education* yang merupakan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, bersifat informal akan tetapi terarah. Adapun kegiatan penguatan *civic literacy* yang dilakukan mengarah pada pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) dengan pola pikir pembentukan suatu pola perilaku warga negara yang baik (*good citizen*), perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai karakter privat dan juga karakter publik.

Penguatan *civic literacy* yang dilakukan pemuda (mahasiswa) merupakan salah satu cara konkret yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Dengan pendekatan informal dan menyenangkan, namun tetap memiliki perencanaan yang baik, penguatan *civic literacy* menjadi salah satu cara yang dapat dipraktikkan dalam rangka pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Adapun pola pembentukan

warga negara yang baik yang mereka lakukan yaitu diawali dengan suatu penanaman pemahaman pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) melalui sosialisasi materi kewarganegaraan, kemudian adanya proses pelatihan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) melalui metode pembelajaran bermain peran, dan proses penumbuhan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) melalui pemberian tanggung jawab berupa tugas-tugas. Adapun arah dari pembentukan warga negara yang baik yang dilakukan yaitu dengan menumbuhkan suatu karakter privat dan karakter publik warga negara.

Karakter privat dibentuk melalui materi-materi yang disosialisasikan, misalnya materi sopan santun, merupakan sebuah materi untuk membentuk rasa hormat warga negara, baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ada pula materi hak dan kewajiban, merupakan sebuah literasi tentang suatu hal yang harus diketahui untuk diimplementasikan setiap warga negara, dan materi-materi lain dengan tujuan menumbuhkan karakter privat seperti tanggung jawab, mandiri, disiplin, hormat, peduli, kreatif, kritis, dan lain-lain. Pada akhirnya, karakter privat tersebut akan mengarah pada implementasi karakter publik, yaitu bentuk ciri warga negara yang baik (*good citizen*) dalam rangka berhubungan dengan sesama warga negara, dan juga berhubungan dengan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sudah barang tentu warga negara harus memiliki kompetensi pengetahuan untuk bagaimana berperilaku dengan orang lain, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Karakter publik ini mengarah pada suatu pola perilaku dan sikap di ranah publik, yaitu pola perilaku horizontal (hubungan sesama warga negara) dan pola perilaku vertikal

(hubungan dengan negara). Pola perilaku horizontal mengarah pada pemahaman tentang kehidupan sosial, bahwa warga negara tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan, untuk itu perlu saling membantu dan menjaga hal-hal yang sifatnya milik bersama, misalnya fasilitas umum. Sedangkan pola perilaku vertikal mengarah pada suatu sikap merasa memiliki negara, seperti sikap nasionalisme, patriotisme, semangat bela negara, dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karakter privat dan karakter publik tersebut merupakan rincian ciri dari warga negara yang baik (*good citizen*), dan penguatan *civic literacy* merupakan salah satu usaha dalam pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) yang dilakukan oleh pemuda (mahasiswa) HMP PPKn Demokratia di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta.

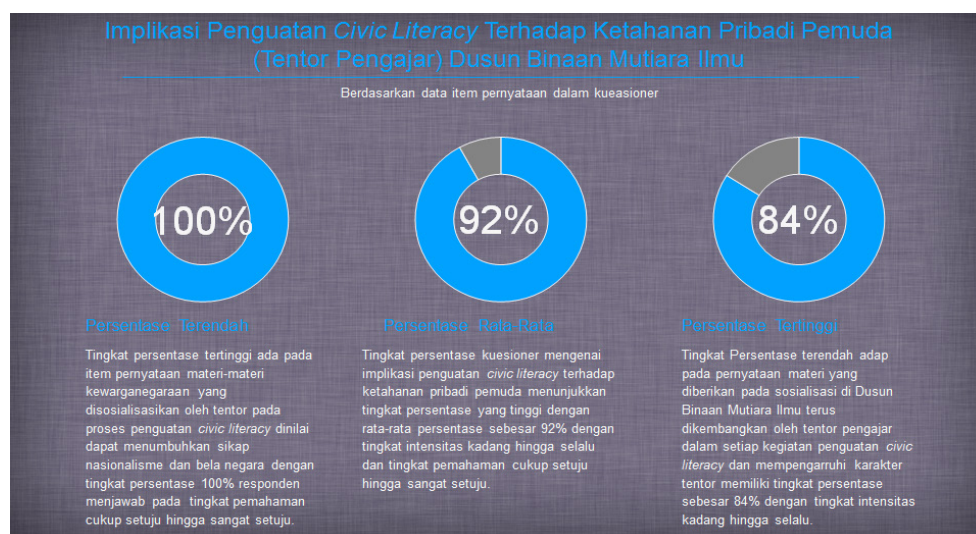
Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda HMP PPKn Demokratia

Penguatan *civic literacy* telah dilakukan pemuda di Dusun Binaan Mutiara Ilmu yaitu berupa adanya kegiatan sosialisasi materi-

materi kewarganegaraan secara reguler di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Adapun kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan tersebut dilakukan secara bergantian secara terjadwal bagi pengajar atau tentor. Pembagian tugas ini sekaligus pembagian materi apa saja yang perlu disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan yang dilaksanakan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Adapun beberapa materi yang disampaikan tentor pengajar yaitu materi-materi dasar seperti pola perilaku sopan santun, saling menghormati, materi hak dan kewajiban warga negara sampai dengan materi tentang demokrasi. Adapun arah dari sosialisasi *civic literacy* yang dilakukan pada dasarnya untuk penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang kemudian diarahkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan menjadi pola acuan bersikap (*civic disposition*) bagi peserta didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Pemuda (mahasiswa) sebagai salah satu aktor dalam pengelolaan Dusun Binaan Mutiara Ilmu merasakan berbagai dampak

Gambar 3
Persentase Implikasi Penguatan *Civic Literacy* pada Pemuda (Tentor Pengajar)



(Sumber: Diolah Peneliti, 2017)

dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, dampak itu berupa manfaat dan pengaruh terhadap diri sendiri yang disebabkan karena mereka menjadi pengurus dan tentor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Dampak, manfaat dan pengaruh ini yang kemudian peneliti simpulkan menjadi suatu implikasi terhadap ketahanan pribadi mahasiswa yang berasal dari peran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam keikutsertaannya menjadi bagian atau aktor dari pengelolaan Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar 3.

Tingkat persentase kuesioner mengenai implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi pemuda menunjukkan tingkat persentase yang tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 92% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu dan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Data tersebut muncul dengan sebaran tingkat persentase item pernyataan kuesioner yaitu bahwa materi yang diberikan pada sosialisasi di Dusun Binaan Mutiara Ilmu terus dikembangkan oleh tentor pengajar dalam setiap kegiatan penguatan *civic literacy* memiliki tingkat persentase sebesar 84% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu. Kemudian implikasi proses penguatan *civic literacy* pada rasa percaya diri pemuda ditunjukkan dengan tingkat persentase item pernyataan terkait dengan adanya dampak bahwa pemuda lebih percaya diri untuk menjadi guru setelah menjadi tentor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu sebesar 94% dengan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, tingkat persentase yang tinggi juga ditunjukkan pada item pernyataan yang menjelaskan bahwa sosialisasi materi kewarganegaraan yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu

berdampak pada karakter tentor sebesar 84% dengan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Proses penguatan *civic literacy* melalui kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan juga membuat tentor menjadi sadar dan lebih mendalami tentang apa itu warga negara yang baik (*good citizen*), ditunjukkan dengan tingkat persentase sebesar 94% dengan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Kemudian menurut responden materi-materi kewarganegaraan yang disosialisasikan oleh tentor pada proses penguatan *civic literacy* dinilai dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan bela negara dengan tingkat persentase 100% responden menjawab pada tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Dan pada akhirnya, pemuda merasa bahwa proses penguatan *civic literacy* yang dilakukan, pada dasarnya dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dengan tingkat persentase sebesar 94% dengan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju.

Adapun secara kualitatif dijelaskan bahwa melalui kegiatan ini tentor pengajar lebih merasa ada pembangunan karakter pada diri sendiri, menjadi lebih disiplin, percaya diri, menumbuhkan sikap nasionalisme, patriotisme dan menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena pada dasarnya sikap menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) merupakan suatu hal yang diperlukan untuk dipraktikkan bagi setiap negara. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Jika warga negara memiliki sikap menjadi warga negara yang

baik (*good citizen*) maka proses pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan berjalan lebih baik pula. Sangat penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pengetahuan tersebut kemudian diimplementasikan pada suatu tindakan berupa patuh terhadap peraturan dan saling menghormati antar sesama warga negara dan menghormati serta melaksanakan kebijakan pemerintah yang sah. Semua hal tersebut ada pada proses sosialisasi materi kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemuda HMP PPKn Demokratia dalam kegiatan penguatan *civic literacy* di Dusun Binaan Mutiara Ilmu.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Murid (Peserta Didik)

Penguatan *civic literacy* yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu tidak hanya berimplikasi pada ketahanan pribadi pemuda (tutor) saja, melainkan juga berimplikasi pada peserta didik di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Maka dari itu, peneliti menjelaskan tentang implikasi penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda (mahasiswa) terhadap ketahanan pribadi warga negara muda. Warga negara muda yang dimaksud dalam hal ini, seperti yang telah peneliti jelaskan terdahulu, terdiri dari pemuda usia 16-30 tahun (UU No. 40 Tahun 2009) dan mereka warga negara yang belum cakap hukum atau belum dewasa juga sudah menjadi warga negara (UU No. 12 Tahun 2006) sehingga peneliti menyimpulkan warga negara muda yaitu termasuk anak-anak (warga negara yang belum cakap hukum) dan juga pemuda (sesuai dengan usia di peraturan perundang-undangan).

Terkait dengan implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi peserta

didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu, dilakukan melalui lomba *civic literacy* yang merupakan sebuah proses evaluasi yang dilaksanakan dengan pendekatan informal berupa lomba dengan menjawab soal-soal pilihan ganda (soal tertulis) dan ada pula soal rebutan (soal lisan) untuk kemudian menentukan pemenang dari lomba *civic literacy*. Ketentuan lomba *civic literacy* yang dilaksanakan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, berupa peraturan sederhana, yaitu lomba dilaksanakan dua babak. Babak pertama yaitu ujian tertulis dengan 20 soal pilihan ganda, dan babak kedua yaitu 15 soal uraian singkat yang disampaikan secara lisan dan dijawab dengan metode rebutan oleh peringkat 5 besar peserta dengan nilai tertinggi di babak pertama. Peraturan ini berlaku sama baik bagi peserta kelompok kelas 1-3 SD maupun bagi kelompok kelas 4-5 SD. Pelaksanaan lomba *civic literacy* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan panitia, ada 5 peserta dengan nilai tertinggi maka akan lolos ke babak 2 (babak rebutan). Pada kelompok kelas 1-3 SD ada 5 peserta dengan rentang nilai 85-90. Sedangkan untuk kelompok kelas 4-6 SD ada 6 peserta yang masuk ke babak 2 dikarenakan ada kesamaan nilai pada peringkat 3 sebanyak 4 peserta, sehingga menjadi 6 peserta pada babak 2 kelompok kelas 4-6 SD. Adapun hasil rentang nilai dari lomba *civic literacy* ini dapat dikatakan ada pada rentangan nilai tinggi dengan rata-rata nilai peserta lomba *civic literacy* kelompok kelas 1-3 SD mencapai nilai 80 dengan rentang nilai 70-95 dengan jumlah peserta sebanyak 25 peserta. Sedangkan untuk kelompok kelas 4-5 SD nilai rata-rata hasil lomba *civic literacy*-nya yaitu 84, lebih tinggi 4 poin dari kelompok kelas 1-3 SD dengan rentang nilai 75-100 dengan jumlah peserta sebanyak 21 peserta. Tingginya hasil nilai lomba

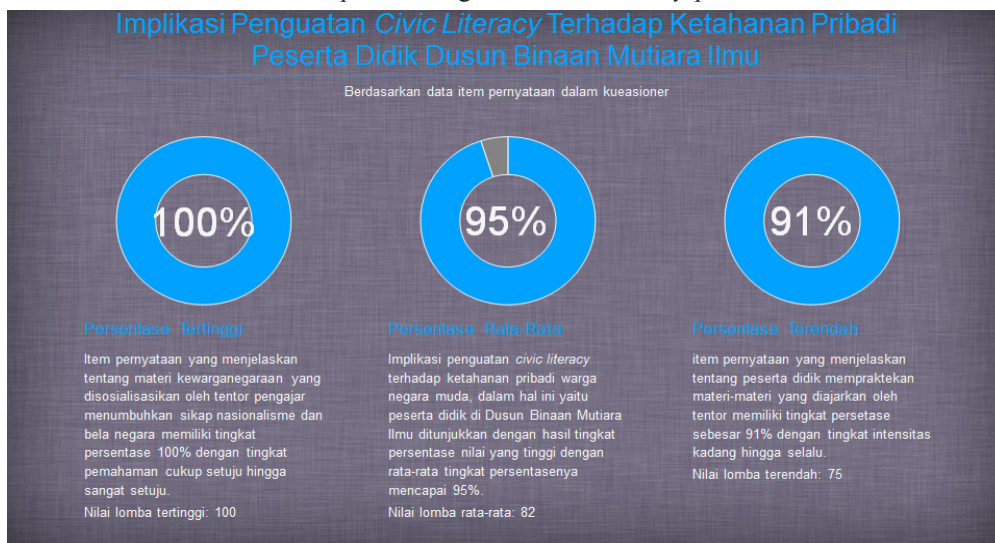
civic literacy merupakan salah satu bentuk implikasi dari proses penguatan *civic literacy* yang dilakukan melalui sosialisasi materi-materi kewarganegaraan yang dilakukan oleh tentor pengajar di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Hasil nilai lomba *civic literacy* tersebut secara kognitif menegaskan bahwa peserta didik mencapai tahap mengingat yang tinggi dengan rata-rata nilai 80 bagi kelompok kelas 1-3 SD dan rata-rata nilai 84 bagi kelompok kelas 4-6 SD.

Kegiatan lomba *civic literacy* tersebut memang diarahkan pada pendekatan evaluasi informal dengan membuat suatu acara atau kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terbukti efektif dengan kehadiran peserta didik mencapai 46 peserta dari total 51 peserta didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu (sekitar 90%). Hasil lomba *civic literacy* dapat dikatakan memuaskan karena nilai peserta lomba yang tinggi, hal ini menunjukkan adanya suatu implikasi secara kognitif bagi peserta didik dalam penguatan *civic literacy* yang dilakukan

oleh pemuda (mahasiswa) di Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Dimulai aspek kompetensi kognitif ini kemudian dapat memunculkan aspek-aspek lain yaitu kompetensi keterampilan dan sikap. Tendor pengajar memantapkan aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terlebih dahulu yang kemudian diarahkan pada keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Hal ini mengarah pada pola perilaku peserta didik yang dimulai dari hal yang kognitif, yaitu mengetahui, melalui sosialisasi dan digencarkan untuk membaca. Sosialisasi hanya sebagai pemantik peserta didik untuk lebih giat membaca, yang kemudian diarahkan ke praktik pola perilaku peserta didik, tentu saja setelah mengetahui tentang nilai-nilai kewarganegaraan, melalui penguatan *civic literacy*. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar 4.

Implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi warga negara muda, dalam hal ini yaitu peserta didik di Dusun Binaan Mutiara Ilmu ditunjukkan dengan hasil

Gambar 4
Persentase Implikasi Penguatan *Civic Literacy* pada Peserta Didik



(Sumber: Diolah Peneliti, 2017)

tingkat persentase nilai yang tinggi dengan rata-rata tingkat persentasenya mencapai 95%. Persebaran persentase implikasi penguatan *civic literacy* tersebut yaitu pada item pernyataan yang menjelaskan bahwa murid merasa senang dalam setiap kegiatan Dusun Binaan Mutiara Ilmu, tingkat persentasenya sebesar 94% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu. Item pernyataan yang menjelaskan tentang materi kewarganegaraan yang disosialisasikan oleh tentor pengajar menumbuhkan sikap nasionalisme dan bela negara memiliki tingkat persentase 100% dengan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju, artinya tidak ada responden yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kemudian terkait dengan pola perilaku peserta didik pada saat kegiatan sosialisasi, item pernyataan yang menjelaskan tentang peserta didik (murid) dalam kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan memperhatikan materi yang disampaikan tentor pengajar tingkat persentasenya sebesar 97% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu. Lebih lanjut item pernyataan yang menjelaskan tentang peserta didik mempraktekan materi-materi yang diajarkan oleh tentor memiliki tingkat persentase sebesar 91% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu. Tingkat persentase item pernyataan yang menjelaskan tentang pola perilaku peserta didik setelah menerima materi kewarganegaraan, peserta didik terlihat antusias untuk menjadi warga negara yang baik memiliki tingkat persentase sebesar 94% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu, dan item pernyataan yang menjelaskan bahwa setelah kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan, tentor dan murid menyadari betapa pentingnya menjadi warga negara yang baik mencapai tingkat intensitas sebesar 94% dengan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju.

Berdasarkan analisis kombinasi data dokumen hasil lomba *civic literacy*, kuesioner dan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penguatan *civic literacy* berimplikasi pada ketahanan pribadi warga negara muda. Pada pemuda (mahasiswa) ditunjukkan dengan tingkat persentase item pernyataan mengenai implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi dengan rata-rata tingkat persentase sebesar 92% dan tingkat persentase penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi peserta didik memiliki rata-rata tingkat persentase sebesar 95%. Data hasil lomba *civic literacy* juga menunjukkan hasil nilai yang tinggi mencapai nilai rata-rata keseluruhan peserta didik yang mengikuti lomba sebesar 82. Secara kognitif rata-rata nilai tersebut menunjukkan suatu tingkat yang tinggi. Implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi warga negara muda yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu pada dasarnya mengarah pada pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*), melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu berupa sosialisasi materi kewarganegaraan dan lomba *civic literacy*. Pembentukan warga negara yang baik tersebut dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu terkait dengan pemahaman kognitif (*civic knowledge*), kemudian praktik (*civic skill*) dan sikap (*civic disposition*). Melalui proses tersebut, baik tentor pengajar maupun peserta didik, sama-sama membangun suatu pola perilaku mandiri, disiplin, tanggung jawab, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap warga negara yang baik berupa sikap bela negara, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, penguatan *civic literacy* oleh pemuda HMP PPKn Demokratia dilakukan dengan proses persiapan, implementasi dan evaluasi dalam kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan (sosialisasi *civic literacy*) dan lomba *civic literacy*. Kegiatan sosialisasi materi kewarganegaraan dilakukan dengan pendekatan pendidikan informal dengan materi, media dan metode yang sudah disiapkan secara terstruktur dan dievaluasi dengan pendekatan yang juga informal berupa lomba *civic literacy*. Kegiatan sosialisasi materi-materi kewarganegaraan tersebut dilakukan secara reguler dengan berbagai model, media dan metode pembelajaran yang beragam seperti media video, model dan metode bermain peran. Adapun implementasi sosialisasi *civic literacy* berisi tiga tahapan penting yaitu tahapan sebelum membaca (membuat prediksi dan mengidentifikasi tujuan membaca), ketika membaca (mengidentifikasi informasi yang relevan, memvisualisasi dan membuat inferensi/kesimpulan) dan setelah membaca (membuat ringkasan, mengevaluasi teks, dan mengkonfirmasi, merevisi, atau menolak prediksi).

Pemuda HMP PPKn Demokratia sebagai tentor pengajar juga selalu menyampaikan informasi-informasi terkini yang berkembang di media massa maupun di masyarakat dengan maksud memberikan stimulus pada murid Dusun Binaan Mutiara Ilmu supaya tertarik dengan isu-isu sosial, kemudian disampaikan juga bagaimana untuk bersikap dalam menghadapi isu-isu yang sedang berkembang baik itu isu politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Adapun lomba *civic literacy* merupakan bentuk evaluasi

kognitif yang sederhana dari penguatan *civic literacy*. Lomba dilaksanakan dengan pendekatan informal yang menyenangkan dalam bentuk tertulis dan lisan dengan soal-soal tipe mengetahui dan memahami yang disusun berdasar pada materi yang telah disosialisasikan.

Penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda (mahasiswa) pada dasarnya memiliki tujuan utama yaitu pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Pemuda (mahasiswa) mempunyai visi dan misi yang dibawa dari lembaga (HMP PPKn Demokratia FKIP UNS) untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*citizenship education*) dalam bentuk penguatan *civic literacy* dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang baik guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang paham dan memiliki literasi tentang bagaimana menjadi warga negara yang seharusnya, warga negara yang sadar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, warga negara yang memiliki nasionalisme, patriotisme dan sikap bela negara. Hal tersebut dilakukan pemuda melalui penguatan *civic literacy* di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta.

Kedua, proses penguatan *civic literacy* yang dilakukan di Dusun Binaan Mutiara Ilmu berimplikasi pada ketahanan pribadi warga negara muda. Warga negara muda yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mahasiswa (tutor pengajar) dan juga peserta didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Bagi mahasiswa (tutor pengajar), penguatan *civic literacy* yang dilakukan melalui sosialisasi *civic literacy* di Dusun Binaan Mutiara Ilmu memberikan dampak pada pola pikir dan pola perilaku mahasiswa. Mahasiswa sebagai

tentor pengajar yang melakukan sosialisasi *civic literacy* menjadi memiliki keinginan dan terus berusaha untuk mempraktikkan materi-materi yang mereka sampaikan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini juga didukung oleh data tingginya tingkat persentase item pernyataan kuesioner terkait dengan item pernyataan tentang adanya implikasi dari kegiatan penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi pemuda dengan rata-rata tingkat persentasenya sebesar 92% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu dan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju. Implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi peserta didik (murid) Dusun Binaan Mutiara Ilmu, ditunjukkan oleh beberapa hal, yaitu tingginya nilai rata-rata evaluasi penguatan *civic literacy* yang dilakukan dengan metode lomba *civic literacy* dengan nilai rata-rata sebesar 82 dan adanya pola perilaku yang menunjukkan indikasi sikap disiplin, mandiri, tanggung jawab dan saling menghormati dengan tentor dan sesama peserta didik lain. Pola sikap tersebut didukung oleh data tingkat persentase item pernyataan kuesioner terkait dengan implikasi penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi peserta didik dengan rata-rata tingkat persentase sebesar 95% dengan tingkat intensitas kadang hingga selalu dan tingkat pemahaman cukup setuju hingga sangat setuju.

Peran pemuda HMP PPKn Demokratia dalam penguatan *civic literacy* di Dusun Binaan Mutiara Ilmu, pada dasarnya memiliki tujuan untuk pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Tujuan tersebut sejalan dengan arah pembentukan ketahanan pribadi, dengan proses yang dilakukan berupa pendidikan kewarganegaraan di masyarakat melalui sosialisasi materi kewarganegaraan di

Dusun Binaan Mutiara Ilmu. Proses tersebut berupa penguatan tentang kesadaran akan kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang kemudian diarahkan untuk dipraktikkan pada kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Sosialisasi *civic literacy* dipersiapkan dengan beragam model, media dan metode, serta dengan pendekatan pembelajaran informal yang mengarahkan suatu pengetahuan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik melalui materi kewarganegaraan, diarahkan untuk dipraktikkan dalam pola perilaku dan sikap. Adanya penguatan *civic literacy* yang dilakukan oleh pemuda HMP PPKn Demokratia di Dusun Binaan Mutiara Ilmu menjadi contoh gerakan *civic literacy* sebagai salah satu alternatif kegiatan dalam rangka membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) bagi komunitas masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya implikasi dari kegiatan penguatan *civic literacy* terhadap ketahanan pribadi baik tentor pengajar maupun peserta didik Dusun Binaan Mutiara Ilmu dengan adanya proses pembentukan warga negara yang baik berupa terciptanya ciri-ciri karakter privat sebagai warga negara dalam rangka berhubungan dengan negara dan karakter publik dalam rangka berhubungan dengan sesama warga negara. Adapun proses pembentukan warga negara yang baik tersebut menunjukkan pada ciri-ciri seorang warga negara yang memiliki ketahanan pribadi, berupa sikap mandiri, tanggung jawab, disiplin, sampai dengan sikap-sikap nasionalisme, patriotisme, bela negara dan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Raharjo, Armaidly Armawi, Djoko Soerjo -- *Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu Di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah)*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., dan Yasin, M., 1974, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Andriani, R., 2015, 'Permasalahan Bangsa Dewasa Ini dalam Pembangunan Karakter', (internet) <http://www.membumikanpendidikan.com/2015/03/permasalahan-bangsa-dewasa-ini-dalam.html> (diakses 26 Oktober 2016).
- Buku Pedoman Organisasi (BPO) Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn Demokratia FKIP UNS, 2016.
- Chandra, M., 2014, 'Peringkat Negara Indonesia di Dunia', (internet) <http://www.kompasiana.com-/10-peringkat-indonesia-di-dunia> (diakses 7 Januari 2017).
- Cholisin, 2010, 'Penerapan *Civic Skills* dan *Civic Dispositions* dalam Mata Kuliah Prodi PKN, *Makalah*, Disampaikan dalam Diskusi Terbatas Jurusan PKN dan Hukum FISE, UNY, 25 September 2010.
- Creswell, J., W., 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Fretes, J, E, 2013, Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Pasca Konflik Tahun 1999 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Ambon Provinsi Maluku), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XIX (1), April, 2013, pp. 19-25.
- Dewanta, P., dan Syaifullah, C., 2008. *Rekonstruksi Pemuda*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Dwipayana, A., 2013, "Civic Literacy", Naskah Combine, Maret 2013, Fisipol UGM.
- Firman, T., 2016, "Tingkat Literasi Indonesia", (internet) <https://tirto.id/literasi-indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS> (diakses 7 Januari 2017).
- Gordon, J., D., dan Gordon, D., D., 2003, 'Drug Abuse in Indonesia: An Increasing Problem During The Economic Crisis', dalam *The Indonesian Crisis: A Human Development Perspective*, ed. A. Ananta, ISEAS Press, Singapore, p. 362 – 81.
- Juru, I., J., 2013, *Dislokasi Wacana Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Miles, Matthew B. & Huberman A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Murdiono, M., 2014, 'Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda', *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3.
- Nuryadi, M, H. 2013. 'Model Pengembangan Peran Serta Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Kota Surakarta'. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XIX (1), April, 2013. pp. 1-11
- Putra, N., dan Hendarman, 2013, *Metode Riset Campur Sari*, Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Soedarsono, S., 1997, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga Sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suryadi, K., 2010, "Inovasi Nilai Dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy". Naskah

- Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Bandung, 24 November 2010.
- Wahyu, Y., 2013, 'Pemuda di Simpang Jalan', (internet) <<http://nasionalkompas.com/read/jajak-pendapat-kompas-pemuda-disimpang-jalan/28/10/2013>> (diakses 10 Oktober 2016).
- Wati, D, C, 2014. 'Peran Lembaga Pendidikan Dasar dalam Pelestarian Bahasa Daerah dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Budaya', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XX (2), Agustus 2014, pp. 58-67.
- Winarno, 2009, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winataputra, U, S, 2014, 'Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013', *Makalah*, Disampaikan dalam Diskusi Semnas PKn-AP3KnI, Tahun 2014.
- Wuryan, S., dan Syaifullah, 2008, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI Bandung.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Wawancara

1. Sri Rahayu
2. Diky Setiawan.